

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor publik berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah dan berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber pendanaan sektor publik berasal dari masyarakat, seperti retribusi daerah dan pajak. Keuangan daerah tidak terlepas dari tata cara pengelolaan yang dipisahkan dan dimiliki oleh daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dan terikat pada undang-undang yang berlaku (Horota, Riani, & Marbun, 2017). Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Kupang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Desentralisasi daerah mewujudkan sebuah pelaksanaan kebebasan bagi daerah atau otonomi daerah, sehingga tugas dan wewenang kepala daerah untuk mengurus dan mengatur roda pemerintahan di tingkat daerah harus melihat pada potensi yang dimiliki daerah dan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemerintah Kab. Kupang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang wajib membuat dan melaporkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya keuangan untuk melakukan program kerja pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah Kab. Kupang pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, rasio keserasian dan rasio efisiensi keuangan daerah (Halim, 2004: 150).

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kab. Kupang, kita dapat mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. (Indrayani, 2019) Salah satu hal yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi Pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya.

Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Analisis terhadap Laporan Keuangan dalam menilai Kinerja Keuangan pada pemerintah Daerah Kab. Kupang akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik atau tidak, serta memberikan dampak positif demi kesejahteraan masyarakat.

Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan dalam mengelola keuangan.

Penelitian terdahulu mengenai Analisis Kinerja Keuangan Daerah yaitu Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh,2016. Melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sedangkan metode analisis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tahun 2001-2014 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali (rata-rata 2,44% per tahun). Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Kaur tahun 2011, 2013 dan 2014 berjalan Kurang Efektif yang ditunjukkan dengan nilai rasio antara 75%-89%, namun pada tahun 2012 berjalan sangat efektif dengan nilai rasio mencapai 107,3%. Rasio Aktivitas dari sisi Rasio Belanja Operasi tergolong baik yakni dengan nilai rasio antara 50%-100%

atau dengan nilai rata-rata 76,7% per tahun sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong tidak baik karena memiliki nilai rasio kurang dari 50% atau dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 23,2% per tahun). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.

Ada juga Penelitian serupa dilakukan oleh Masita Machmud, 2014. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah Provinsi berhasil mengelolah keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG**”.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka rumusan masalah adalah :“**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG**”.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab. Kupang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah?
- b. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab. Kupang dilihat dari rasio efektivitas PAD?
- c. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab. Kupang dilihat dari rasio pertumbuhan?
- d. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kab. Kupang dilihat dari rasio keserasian?
- e. Bagaiman kinerja keuangan pemerintah daerah Kab. Kupang dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Hal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kab.Kupang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kab. Kupang dilihat dari rasio efektivitas PAD.
- c. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kab.Kupang dilihat dari rasio keserasian.
- d. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kab. Kupang dilihat dari rasio pertumbuhan.
- e. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kab. Kupang dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat untuk beragam pihak yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memperdalam pengetahuan di bidang akuntansi khususnya dalam hal menganalisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan daerah Kab. Kupang

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi akademik, dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian analisis kinerja keuangan.

- b. Bagi pemerintah, dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sebagai bahan evaluasi analisis Laporan Keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan.
- c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan memeperdalam pengetahuan dibidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan.